

MENGHIDUPI TOLERANSI, MEMBANGUN KEBERSAMAAN

REVIVE TOLERANCE, BUILD TOGETHERNESS

RB. Soemanto

Program Studi Sosiologi FISIP UNS

soemanto_rb@yahoo.com

ABSTRACT

Tolerance is part of the social ethics that underpins quiet attitudes and actions over goodness and truth in social interaction together. Social ethics enlivens tolerant attitudes and behaviors, living and glorifying goodness and truth in society. as well as Control as thoughts and actions based on ethical values according to prevailing social norms and laws, thus manifesting the achievement of common interests. This research uses literature study method in book literature, journal and supporting data. The results showed that individual actions in society such as choosing the type of education and work, doing something, working together, working together, family life, also the act of voting and giving support in the General Election or 'Democracy party' is the decision of a person and a group of people in accordance with his wishes done ethically and morally and faithfully good and right; taking into account individual or collective interests. The difference in choice is the price of the relative goodness and truth that it claims to be. Choice as the legal and social rights and obligations of a person who is respected and acknowledged. Elections in Indonesia are indicated by the phenomenon of power dispute through political parties with 'money politics'; the process of buying and selling voters votes. Vote buyers do it for the winner of the political contestation. Such preferred transactions undermine the rights of people, people and the dignity of popular sovereignty. Vote buyers are aware of 'money politics' to win the election. They are part of the elements of members, cadres and administrators of real political parties as perpetrators of political education of the people (citizens), but that act injures the value and process of democratization. The contradictions of the status and role of stakeholders of democratization show a deviant political behavior towards the development of democracy and the life of the nation

Keywords: *tolerance, togetherness, voter, ELECTION*

ABSTRAK

Toleransi bagian etika sosial yang melandasi sikap dan perbuatan yang tenang di atas kebaikan dan kebenaran dalam interaksi sosial bersama. Etika sosial menghidupkan sikap dan perilaku toleran, menghidupi serta mengagungkan kebaikan dan kebenaran di masyarakat. Pengendalian sebagai pemikiran dan tindakan yang dilandasi nilai etika menurut norma/kaidah sosial dan hukum yang berlaku, sehingga memanifestasikan pencapaian kepentingan bersama. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi pustaka pada literatur buku, jurnal dan data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan individu di masyarakat seperti memilih jenis pendidikan dan pekerjaan, mengerjakan sesuatu, bekerjasama, bergotong royong, hidup berkeluarga, juga tindakan memilih dan pemberian dukungan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau 'Pesta demokrasi' adalah keputusan seseorang dan sekelompok orang sesuai dengan keinginannya yang dilakukan secara etis dan moral serta keyakinan baik dan benar; dengan mempertimbangkan kepentingan individu maupun bersama. Perbedaan pilihan adalah harga dari kebaikan dan kebenaran relatif yang dikeyakini. Pilihan sebagai hak dan kewajiban sosial dan hukum seseorang yang dihormati dan diakui. Pemilihan umum di Indonesia terindikasi fenomena perebutan kekuasaan melalui partai politik yang sarat dengan praktik 'money politic' atau politik uang; proses jual-beli suara pemilih. Para pembeli suara melakukannya untuk kemenangan kontestasi politik itu. Transaksi pilihan seperti itu merendahkan hak orang, rakyat dan martabat kedaulatan rakyat. Pembeli suara menyadari "money politic" untuk memenangkan perebutan kekuasaan. Mereka bagian dari unsur anggota, kader dan pengurus partai politik yang sesungguhnya sebagai pelaku pendidikan politik rakyat (warga negara), namun tindakan itu mencederai nilai dan proses demokratisasi. Kontradiksi status dan peranan dari para stakeholder demokratisasi menunjukkan perilaku politik menyimpang terhadap pembangunan demokrasi dan kehidupan berbangsa.

Kata Kunci: *toleransi, kebersamaan, pemilih, PEMILU*

PENDAHULUAN

Filosof Isaiah Berlin (dalam Tilaar, 1999) mengemukakan bahwa yang diperlukan dalam masyarakat bukan sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai. Justru yang paling penting di dalam masyarakat yang berbhinneka adalah adanya saling pengertian. Toleransi dan kendali mengandung nilai sosial budaya, politik dan hukum yang mengikat hubungan-hubungan (interaksi) sosial di masyarakat, dan organisasi sosial. Kata toleransi mengandung makna tenggang rasa terhadap suatu keadaan, menghargai sesuatu, seseorang/sekelompok orang dengan memperhatikan eksistensi lingkungannya. Sedang kendali dimaknai sebagai fungsi kontrol terhadap hawa nafsu, keinginan diri (ego) yang berhubungan dengan tujuan tertentu untuk mewujudkan kebersamaan sebagai masyarakat, organisasi, kelompok, bangsa dan lain-lain (dikembangkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996). Secara lebih lanjut Hubungan sosial internal dan eksternal individu membawa dalam dirinya sikap maupun respon sosial berupa toleransi dan pengendalian diri untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial. Perilaku toleransi dan pengendalian diri berlangsung selama proses internalisasi dan

sosialisasi peran sosial dalam keluarga, masyarakat, organisasi dan lingkungan sosial yang lain.

Transformasi sosial berlangsung dalam intensitas dan dinamika yang beragam; toleransi dan kendali terjadi ibarat orang menabur, berharap menuai hasil. Seseorang yang berperilaku toleran di masyarakat berperilaku mengendalikan diri. Karena kepentingan/kebutuhannya terakomodasi selama proses interaksi sosial.

Sedangkan perilaku menyimpang timbul ketika ada kontradiksi perilaku toleran dengan pengendalian diri. Misalnya, korupsi terjadi dalam interaksi sosial yang timpang; ia berlangsung ketika nilai toleransi dan kendali lemah fungsi kontrol normatifnya, kendor ikatan nilai kejujuran, kebaikan, dan kebersamaan serta sikap abai terhadap norma sosial dan hukum yang mestinya dijaga dan dihormati. Karena dorongan egoisme yang menguat.

Perilaku menyimpang yang lain, seperti misalnya: kekerasan individual remaja, kekerasan dalam keluarga, pertikaian antar siswa-siswa sekolah menengah juga mahasiswa di perguruan tinggi, antar kelompok pemuda di masyarakat dan sebagainya mengindikasikan sistem sosial, sistem kekuasaan (politik) dan sistem hukum secara saling terkait cenderung kurang kondusif

berfungsi menabur sikap peduli, toleransi dan kendali warga masyarakat, sehingga tidak efektif memupuk spirit kebersamaan. Ego sentrisme individu dan kelompok menjadi sumber konflik sosial.

Beberapa fenomena sosial di atas mengartikulasikan tentang dampak perubahan sosial dan terpenuhinya harapan masyarakat. Perubahan sosial berlangsung cepat di masyarakat. Perubahan status dan peran sosial seseorang maupun kelompok orang tidak mesti berlangsung vertikal. Misalnya makin tinggi tingkat pendidikan, tidak mesti dapat bekerja sesuai dengan status dan jenjang pendidikan yang dicapai. Koentjaraningrat menyebutkan ebab-sebab terjadinya perubahan sosial-budaya antara lain dikarenakan adanya perubahan demografi (*demographic change*), pergerakan dan perubahan sosial (*social movement and change*), serta adanya penemuan-penemuan.

Penemuan itu sendiri meliputi persebaran kebudayaan (*diffusion*), inovasi dan evolusi kebudayaan (dalam Syapsan dkk, 2010).

Keluarga sebagai lembaga sosial primer telah mengalami perubahan fungsi pendidikan khususnya dalam membangun jiwa toleransi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran sosial dan emosional keluarga justru bergeser ke peran ekonomis semata.

Data yang diterbitkan oleh SETARA Insitute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila memberikan gambaran terhadap kondisi Indeks Kota Toleran (IKT) di 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia menggunakan metode kerangka Grim dan Finke yang dimodifikasi dengan variabel lain, yaitu komposisi penduduk berdasarkan agama menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel. 1. Peringkat IKT Tertinggi dan Terndah

IKT Tertinggi			IKT Terendah		
No.	Kota	Skor	No	Kota	Skor
1	Manado	5,90	1	DKI Jakarta	2,30
2	Pematangsiantar	5,90	2	Banda Aceh	2,90
3	Salatiga	5,90	3	Bogor	3,05
4	Singkawang	5,90	4	Cilegon	3,20
5	Tual	5,90	5	Depok	3,30
6	Binjai	5,80	6	Yogyakarta	3,40
7	Kotamobagu	5,80	7	Banjarmasin	3,55
8	Palu	5,80	8	Makassar	3,65
9	Tebing Tinggi	5,80	9	Padang	3,75
10	Surakarta	5,72	10	Mataram	3,78

Sumber : SETARA Insitute, 2017

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan yang kontras antara skor tertinggi dan terendah Indeks Kota Toleran di Indonesia. Jika dikaitkan dengan peran keluarga padahal pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Anak sejak kecil sudah mendapat pendidikan dari kedua orang tuanya melalui keteladanan dan pembiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga. Baik tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup orang tua akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak (Shulton, 20016).

Faktanya bahwa keluarga bukan lagi institusi yang mampu menjamin proses sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma yang terkandung dalam toleransi dan kebersamaan bagi anggotanya sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengambilan data yang bersumber dari studi pustaka. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam

melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah (Sugiyono, 2012: 291).

Penulis mencari sumber literatur berupa buku, data, dan sumber lain yang relevan dengan tema mengenai toleransi dan kebersamaan.

1. **Buku meliputi** : *Sociology: Key Concept, ed. John Scott*; Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia; Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Sosiologi Keluarga; Strategi Reformasi Pendidikan Nasional;
2. **Jurnal meliputi** Jurnal Visi Komunikasi; Jurnal Edcometch; Jurnal Ekonomi; dan,
3. **Data** dari SETARA Insitute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila. 2017. RINGKASAN EKSEKUTIF INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Indonesia yang mengalami perukaan sosial tidak seluruhnya berlangsung secara vertikal. Karena sistem sosial budaya, ekonomi maupun politiknya tidak dapat berinteraksi secara cepat dan memadai dengan potensi eksternal daya tarik perubahan sosial. Perbedaan konsepsi

dan kerangka pemikiran potensi daya tarik eksternal dan daya dorong internal perubahan social dalam masyarakat memerlukan proses dan waktu untuk terjadi proses interaksi sosial yang sebanding dengan tujuan.

Marry Ann (dalam Soemanto, 2009) menjelaskan bahwa pembentukan keluarga merupakan awal terbentuknya fungsi-fungsi social pokok keluarga. Keluarga (suami, isteri dan atau anak) memiliki tanggung jawab sosial dalam mengembangkan keturunan (reproduksi), bertanggung jawab menghidupkan ekonomi rumah tangga; mendidik dan mengajar, mengasuh dan membesarkan anak; menginternalisasi nilai sosial budaya, mensosialisasi peran sosial mendasarkan nilai dan norma masyarakat, serta mengembangkan dan membangun religiusitas. Fungsi-fungsi universal keluarga tersebar dan dijalankan oleh keluarga-keluarga di manapun dalam bentuk dan keragaman perilaku. Praktek hidup keluarga dijalankan dengan misi yang sama yaitu mewujudkan harapan keluarga sejahtera yang luhur bagi anak-anak yang dilahirkan.

Harapan keluarga pada anak berdimensi jangka pendek dan jangka panjang (hari depan). Pada hari ini, keluarga berharap anak-anaknya cukup terpenuhi kebutuhan dasarnya: makan, minum, sehat fisik, belajar

terhadap lingkungannya, mewariskan nilai dan norma utama keluarga dan masyarakat, bermanfaat bagi bangsa dan sesama. Atas nama harapan keluarga pada anak, keluarga berusaha dan melakukan hal-hal terbaik (menurut nilai luhur lingkungan sosial) dalam jalur fungsi pokok keluarga dengan maksud agar anak tumbuh, berkembang, dan berbuah bagi dirinya, keluarga, dan sesama. Keluarga menabur toleransi dan kebersamaan (hal terbaik), berharap agar anak menuai dan menghidupi perilaku sosial sesuai harapan keluarga masyarakat.

Keluarga merupakan unsur penting dalam masyarakat. Kehadiran anak menjadi harapan sosial, bermasyarakat untuk menghidupi toleransi. Bagi masyarakat, anak-anak merupakan manifestasi ruh (*spirit*) hidup yang mengikat kebersamaan keluarga dan masyarakat. Anak juga menjadi sumber energi sosial budaya yang menggerakkan peran masyarakat dengan pembinaan dan teladan tokoh masyarakat yang mengawasi dan melindungi anak-anak. Anak-anak memahami peranan positif melalui pengawasan dan perlindungan masyarakat, mereka menyadari kedudukan dan peran sosial menjaga hubungan organis, dan keseimbangan sosial. Tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat terbangun, melalui peran tokoh-tokohnya, lewat lembaga-lembaga sosial

yang menanamkan (menabur) nilai perilaku dan tanggung jawab sosial.

Anak muda selaku pemilih dalam PEMILU mengerti kedudukan, menyadari peranan, seturut keteladanan tokoh idolanya dalam mengakomodasi pencapaian tujuan bersama dalam kebersamaan. Keluarga dan masyarakat memiliki anggota dengan jenis pekerjaan, pendidikan, organisasi sosial, ekonomi, politik, budayayang berbeda. Secara hukum warga masyarakat adalah rakyat yang berstatus sama yaitu warga negara. Di hadapan hukum, kedudukan mereka (sebagai warga negara) sama (*Men are equal before the law*)

Anak muda sebagai warga masyarakat dan negara memiliki dimensi sosial, demografis, politik, psikologis dan hukum; mereka kelompok sosial yang memiliki karakteristik khusus. Kelompok sosial anak muda memiliki sifat solidaritas mekanis dan organis. Mereka dididik dan dibina di dalam lingkungan primer (keluarga) melalui internalisasi nilai dan sosialisasi peranan sosial yang sifatnya mekanis. Faktor internal dan eksternal bersama memberi pengajaran karakter pribadi dan keingintahuan yang dinamis tentang sesuatu di sekelilingnya, sehingga solidaritas sosialnya bersifat organis. Dalam status dan kapasitasnya sebagai Pemilih dalam Pemilu, anak

muda memiliki rasionalitas dan pertimbangan sosial politik yang dekat dengan kepentingan masa depan yang baik sebagaimana harapannya dalam penggunaan hak pilih dalam Pemilu. Secara demografis, anak muda Indonesia tergolong dalam kelompok struktur umur 17 - 29 tahun dan secara yuridis memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab sosial. Secara individu mampu membuat keputusan dan melakukannya serta mempertanggungjawabkan pada masyarakat. Secara psikologis, pemuda memiliki jiwa, semangat dan pemahaman hari depan, harapan dan cita-cita serta permasalahan dalam keluarga, tata kehidupan masyarakat dan bangsa. Pengalaman peristiwa-peristiwa di Indonesia dan bangsa lain tentang peranan pemuda menunjukkan bahwa kelompok sosial ini menjadi sumber inspirasi gerakan sosial politik, ekonomi dan budaya. Mereka pelaku gerakan kepentingan bersama bagi kepentingan masa depan. Mereka terdorong untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bervisi sama, seperti pada Pemilu.

Secara hukum anak muda adalah individu yang berstatus warga negara merdeka dan berdaulat dan berharap mendapat jaminan hidup masa depannya tidak terkecuali dalam bidang politik. Namun seberapa jauh tingkat partisipasi

generasi muda dalam bidang politik sering kali menjadi bahan perdebatan. Generasi muda seringkali dianggap sebagai kelompok masyarakat yang paling tidak peduli dengan persoalan politik, yang sering kali mengalami putus hubungan dengan komunitasnya, yang tidak berminat pada proses politik dan persoalan politik, yang memiliki tingkat kepercayaan rendah pada politisi serta sinis terhadap berbagai lembaga politik dan pemerintahan (Morissan, 2016).

Pemilu sebagai simbol kepentingan bangsa, memunculkan fenomena “Golput” (golongan putih) – tidak menggunakan hak politik dalam Pemilu; sebagian besar disinyalir berasal dari kalangan pemuda. Hal ini bisa terjadi karena hambatan dalam komunikasi politik di masyarakat, serta komunikasi politik rakyat dan negara.

Toleransi dan Perkembangan Hidup Kebersamaan

Harapan perilaku individu di lingkungan keluarga, kelompok sosial, masyarakat dan bangsa didasarkan pada ikatan nilai utama, etika dan norma yang berlaku. Tindakan dan tanggung jawab anak muda, di lingkungan keluarga, kelompok sosial dan di masyarakat serta Negara sebagai wujud toleransi terhadap nilai dan semua ketentuan normatifnya. Jika proses internalisasi dan

sosialisasi peran sosial pemuda berlangsung signifikan, maka mampu menumbuhkan sikap, kesadaran dan respon positif; berarti perilaku toleransi keluarga, kelompok sosial, masyarakat dan negara (pemerintah) terhadap kelompok pemuda merupakan akomodasi bermakna terhadap kalangan anak muda.

Idealnya, kelompok sekunder, seperti lembaga pendidikan berperan penting dalam membangun karakter anak muda. Dalam kondisi itu sosialisasi peran pemuda oleh keluarga dan lembaga pendidikan dominan pengaruhnya dalam mengembangkan perilaku toleransi dan kepedulian pada sesama dan lingkungan sosial.

Seiring perubahan sosial yang cepat saat ini, dominasi faktor eksternal berpengaruh langsung dan tidak langsung secara kontinu dan efisien terhadap dunia kehidupan anak muda. Informasi global dalam beragam jenis, sifat dan bentuk berkembang cepat lewat fungsi teknologi informasi. Dalam informasi itu diantaranya termasuk ide, pemikiran dan praktik hidup dengan kemasan gaya hidup baru dan ekstra maju hadir dan menyergap ruang hidup dan kehidupan anak muda. Hal ini dibuktikan oleh *Pew Research Center* yang menyebutkan bahwa generasi millennial ini dibanding

generasi sebelumnya adalah soal penggunaan teknologi dan budaya (Prasetyani, 2015).

Generasi millennial atau millennium disebut Generasi Y. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, *instant messaging* dan media sosial seperti *facebook* dan *twitter*, dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era *internet ooming* (Lyons, 2004). Lebih lanjut Lyons, 2004 mengungkapkan ciri-ciri dari generasi Y adalah: karakteristik masing-masing individu berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya, pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya, pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan (Lyons, 2004). Paparan informasi ini cenderung meminggirkan ide dan pemikiran lokal dan nasional, ketika filter nilai sosial budaya serta ide dan pemikiran bangsa tidak terpelihara.

Rakyat selaku individu memiliki hak dan kewajiban yang harus ditanggungnya. khususnya di bidang sosial dan politik mestinya dijalankan. Penggunaan hak dan kewajiban sipil disosialisasikan melalui pendidikan keluarga, lembaga pendidikan dan partai politik. Di Amerika Serikat, mendiang Presiden John F. Kenedy misalnya, mendidik rakyatnya dengan adagium: “...jangan menanyakan apa yang diberikan negara, tapi tanyakan apa yang telah disumbangkan pada negara...”.

Pemuda diharapkan dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam habitus sosial yang toleran, agar pada saatnya, sekarang dan kemudian mampu berperan positif (terkendali) bagi kepentingan bersama bangsanya dengan habitus dalam artian kondisi kejiwaan, semangat pelaku yang melekat secara sosial (Elias, 2011). Sifat-sifat khusus yang melekat dengan jiwa, semangat dan tubuh; dimana sifat itu didisposisi dan didaur ulang secara berkelanjutan dengan melihat, berpikir, menghargai, bertindak dan mengambil keputusan dari proses sosialisasi di masyarakat, kebudayaan serta sub budayanya (Bourdieu, 2011).

Jika sosialisasi dan pendidikan sosial politik berlangsung baik dan efektif, niscaya partisipasi pemuda dalam pelaksanaan dan

penyelenggaraan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat atau hidup bersama dan kebersamaan berlangsung efektif. Partisipasi pemuda sebagai pemilih dalam Pemilu (menggunakan hak pilihnya) akan baik dan bermakna. Tindakan pemuda itu dilakukan dengan landasan rasional dan afektif. Tindakan itu signifikan bagi kepentingan bersama, dan kepentingan ke depan anak-anak muda.

Anak muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mesti meyakini dasar ideologi negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Secara normatif dan fungsional pemerintah menjalankan amanat dan mandat rakyat untuk menjalankan kebijakan dan program-program pembangunan dan bertanggung jawab bagi tercapainya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Mereka melakukannya dengan niat serta perilaku jujur dan bervisi pada kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Semangat dan perilaku itu sesungguhnya menghidupkan toleransi sosial termasuk di dalamnya teladan baik bagi generasi muda yang wajib menghidupi kebaikan dan kebenaran dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Seluruh perilaku itu adalah wujud persemaian meng-

hidupkan jiwa toleransi dan pengendalian demi kebersamaan, dan pada gilirannya membuah hasil yang baik, maka pengendalian perilaku segenap unsur masyarakat dan bangsa, termasuk anak muda menjadi potensi penting bagi terwujudnya kepentingan bersama dalam spirit kebersamaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kebersamaan dan toleransi yang tumbuh dan berkembang secara psikis, pikiran dan fisiknya dalam habitus toleransi sosial yang ideal dan berkelanjutan didasari nilai besar (dasar) yang diyakini, dihormati, dan diagungkan masyarakat bangsanya, niscaya memberi jiwa dan semangat yang berperan positif (pengabdian) bagi hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Begitupun, pemuda Indonesia yang mendapatkan teladan dan kondisi kehidupan yang berhabitus toleransi sosial (kebersamaan) yang besar dan berkelanjutan, serta perilaku terkendali niscaya menumbuhkembangkan semangat untuk ambil bagian dalam setiap penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud kehidupan bangsa yang terus dikembangkan dan dihormati secara afektif dan rasional dalam semangat nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, Piere. 2011. *Sociology: Key Concept*, ed. John Scott. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ellias, Nobert. 2011. *Sociology, Key Concept*, ed. John Scott. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Lyons, S. 2004. An exploration of generational values in life and at work. *ProQuest Dissertations and Theses*. 441-441.
- Morissan. 2016. Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial Generasi Muda Pengguna Media sosial. *Jurnal Visi Komunikasi*. Vol. 15 No. 1 hlm. 96-113
- Prasetyani, Retnayu. 2017. Generasi Millennial dan Inovasi Jejaring Demokrasi Teman ahok. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*. Vol. 3 No. 1 hlm. 44-52
- SETARA Insitute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila. 2017. RINGKASAN EKSEKUTIF INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2017. <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/> (diakses pada 26 Juli 2018)
- Soemanto. 2009. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. hlm. 291
- Sulthoni. 2016. Pendidikan Nilai Berbasis Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat. *Jurnal Edcometch* Vol. 1 No. 1 hlm. 93-102
- Syapsan, Syafril Basri, dan Elida Ilyas. 2010. Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta) Koto Panjang Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*. Vo. 18 No. 2 hlm. 17-22
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung